



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Kecamatan Sukorejo Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kejayan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Kejayan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Kejayan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Kejayan yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Kejayan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Kejayan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Kejayan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kejayan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN KEJAYAN

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Kejayan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Kejayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Kejayan dalam menyusun Renja Kecamatan Kejayan.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Kejayan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEJAYAN;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KEJAYAN;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Kejayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Kejayan wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Kejayan dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Kejayan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Kejayan.
- (2) Camat Kejayan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Kejayan Tahun 2027, Renstra Kecamatan Kejayan Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Kejayan Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 52

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEJAYAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Kejayan, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Kejayan harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Kejayan dan Renja Kecamatan Kejayan, Kecamatan Kejayan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Kejayan dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kejayan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Kejayan/lintas Renstra Kecamatan Kejayan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Kejayan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Kejayan yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Kejayan Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kejayan Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

HASIL VERIFIKASI RANKHIR RENSTRA 2024-2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEJAYAN

No	Sistematika Renstra	Catatan Hasil Verifikasi
1.	Bab I Pendahuluan	
	1.1. Latar Belakang	belum ada Visi – Misi Kepala Daerah
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	
	1.3. Maksud dan Tujuan	Ditambahkan penjabaran sesuai RPD 2024-2026
	1.4. Sistematika Penulisan	Disesuaikan dengan Inmendagri 52 Tahun 2022
2.	Bab II Gambaran Pelayanan PD	
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	- Data harus diupdate dan harus menyertakan sumber data
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	Ditambahkan tabel nilai IP masing-masing ASN
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Table – table tampilkan juga target anggaran dan realisasi tahun 2023
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	
	2.5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada)	Belum disebutkan Mitra PD (koramil, polsek, puskesmas, Desa/Kelurahan, Pokmas /Tomas, Toga, dll)
	2.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada)	-
	c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD (apabila ada)	-
3.	Bab III Permasalahan dan Isu Strategis	
	3.1. Permasalahan	
	3.2. Isu Strategis	- Isu ditinjau dari 5M - Banyak yang belum diangkat (ODF, Stunting, HIV, TBC, kemiskinan, Pendidikan dasar, UMKM banyak yang belum bersertifikat halal, Pertanian dan ketahanan pangan
4.	Bab IV Tujuan dan Sasaran	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	- table TC.24 dilengkapi - Tabel TC. 25, Tabel TC.26, Tabel TC.27 dan Tabel TC.28 belum ada - untuk Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan sesuaikan dengan BA Verifikasi Rancangan Renstra PD Kab.Pasuruan Tahun 2024-2026 dan sesuaikan dengan Kepmen 050-5889 .
	4.2. Cascading Kinerja	Belum ada
5.	Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	Sesuaiakan dengan isu (contoh dibidang SDM : peningkatan SDM secara terstruktur melalui Bimtek SDM) Ditambahkan Tantangan dan Peluang Untuk kebijakan menyesuaikan strategi.
6.	Bab VI Rencana Progam, Kegiatan, dan Subkegiatan, serta pendanaan.	ada

7	Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	-
	7.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)	-
	7.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKK)	-
8	Penutup	Narasi diperbaiki

Berdasarkan catatan tersebut, dimohon untuk segera melakukan perbaikan dan hasilnya disampaikan kembali kepada verifikator paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

KECAMATAN KEJAYAN

Pasuruan, 16 Maret 2023
Verifikator Bappelitbangda

AMELIA MD, SE, MM

SYARIFAH AINI, ST

IRMA WIDIASTUTI, SP

Verifikator	N a m a	Tanda Tangan Desk I	Tanda Tangan Desk II	
Pendamping				
Kabid Bappelitbangda				
Kasubag PPL / Perencana PD				

Catatan : Berita Acara ini dapat berubah, jika diperlukan penyesuaian setelah penetapan Perkada RPD.

KEPALA BAPPELITBANGDA

CAMAT KEJAYAN

Ir. IHWAN, M.Si.
NIP. 196302031989031015

BASMI, S.Pd,MM
NIP. 196702081998021004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi *mainstream* perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Kejayan. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kejayan.

Poin-poin substansi Renstra Kecamatan Kejayan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukannya harmonisasi antara perubahan Renstra Kecamatan Kejayan Tahun 2024-2026 merupakan upaya penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
- b. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga berakibat dilakukannya penyesuaian nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimulai pada RKPD Kecamatan Kejayan Tahun 2021.
- d. Berakhirnya Periodeisasi Renstra yang bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/ Wakil Bupati Periode 2018-2023.

Renstra Kecamatan Kejayan adalah dokumen perencanaan yang disusun dalam menentukan langkah-langkah pencapaian tujuan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Kejayan dalam lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Kejayan disusun dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis seiring terjadinya Pandemi Covid-19.

Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani Pandemi Covid-19, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan pencermatan terhadap capaian target kinerja dalam dokumen Renstra tahun sebelumnya, dengan membandingkan target dan realisasi capaian program/ kegiatan pada situasi Pandemi Covid-19, sebagaimana dokumen perjanjian kerja yang telah ditetapkan.

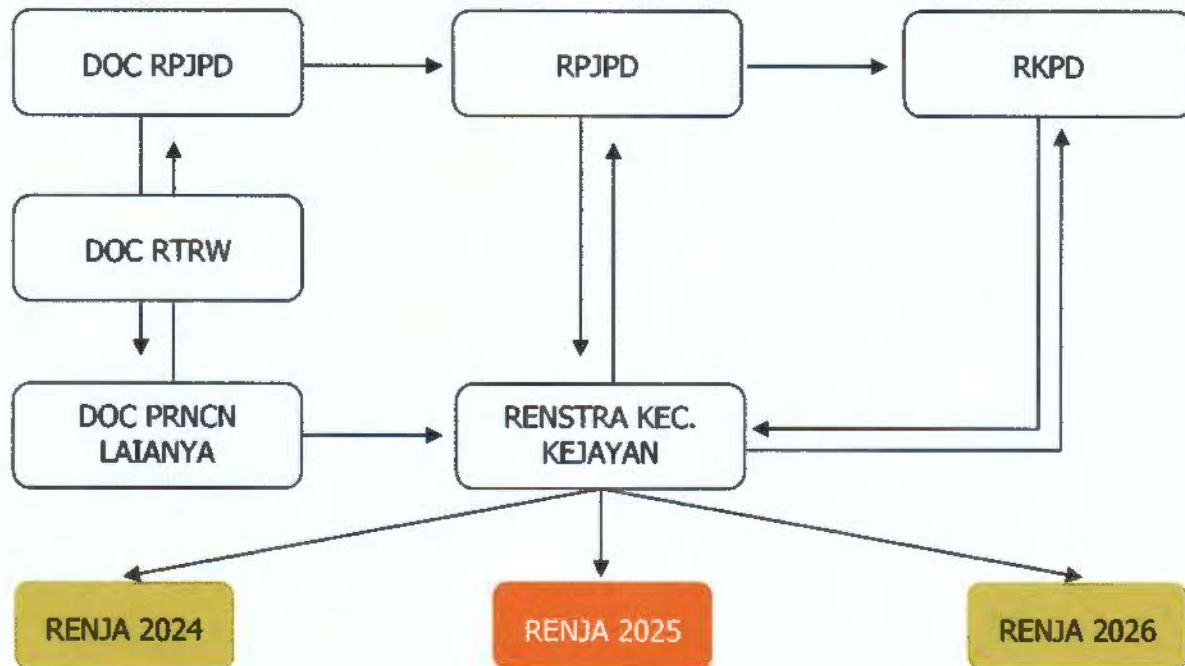
2. Melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi Pandemi COVID-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang.
3. Melakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan dinamika lingkungan strategis yang mengiringinya. Dalam hal ini semua program yang telah ditetapkan di periode lima tahun keempat 2020-2025 dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya dan dijadwal ulang periode pelaksanaannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Perubahan atas Renstra Kecamatan Kejayan Kecamatan Kejayan Tahun 2024-2026 dilakukan sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 sangat penting untuk dilakukan, karena selain adanya pemangkasan anggaran, hilangnya beberapa kegiatan juga munculnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan Pandemi Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019.

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Kejayan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar : 1.1

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan COVID-19.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2022.
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 050/ / HK / 424.013 / 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kejayan ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Kejayan. Kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kejayan disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Kejayan pada setiap tahun anggaran periode 2024-2026 dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Kejayan ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Kejayan dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode 2024-2026;
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Kecamatan Kejayan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 2024-2026;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Kejayan;
4. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Kejayan berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Kejayan 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN Kecamatan Kejayan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASLAAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026;
 - 4.2 Penetapan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- 6.1 Rencana Program
 - 6.2 Rencana Kegiatan
 - 6.3 Kelompok Sasaran
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII : PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Kejayan terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar : 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasain penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengumpulan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordnasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Kejayan sampai Bulan Desember 2017 (triwulan IV) adalah sebanyak 22 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Kejayan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	JENIS KELAMIN	PNS	PTT	JUMLAH
1.	Laki-Laki	11	2	13
2.	Perempuan	5	1	6
JUMLAH		16	3	19

Tabel : 2
 DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH
1.	IV/a – Pembina	1
2.	III/d – Penata Tk. I	-
3.	III/c – Penata	-
4.	III/b – Penata Muda Tk. I	3
5.	III/a – Penata Muda	
6.	II/d – Pengatur Muda Tk. I	5
7.	II/c – Pengatur	
8.	II/b – Pengatur Muda Tk. I	
9.	II/a – Pengatur Muda	
JUMLAH		16

Tabel : 3
 DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	PNS	PTT
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	-
2.	Sarjana (S1)	3	-
3.	Diploma IV	-	-
4.	Diploma III	-	-
5.	Diploma II	-	-
6.	Diploma I	-	-
7.	SMA	9	3
8.	SMP	1	-
9.	SD	-	-
JUMLAH		16	3

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Kejayan meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel : 7

DATA SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN KEJAYAN

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Avanza	1 unit
2.	Isuzu Panther 2002	1 Unit
3.	Suzuki RC 100	2 Unit
4.	Honda WIN	3 Unit
5.	GL Pro	1 Unit
6.	Komputer	10 Unit
7.	Laptop	7 Unit
8.	Printer Epson LQ 2180	1 Unit
9.	Printer Epson L.455	1 Unit
10.	Printer Epson L.800	1 Unit
11.	Printer Epson L210	2 Unit
12.	Printer Epson L380	1 Unit
13.	Printer Epson L360	1 Unit
14.	Printer Deskjet	2 Unit
15.	Mesin Ketik	1 Unit
15.	Sound Sistem	2 Unit

Ditambah rekap IP ASN semua pegawai (22 ASN), dihitung rata-ratanya, dianalisis. Yang nantinya berpengaruh pada pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan & pelatihan yang akan dilaksanakan di kecamatan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganisebagai urusan otonomi daerah.

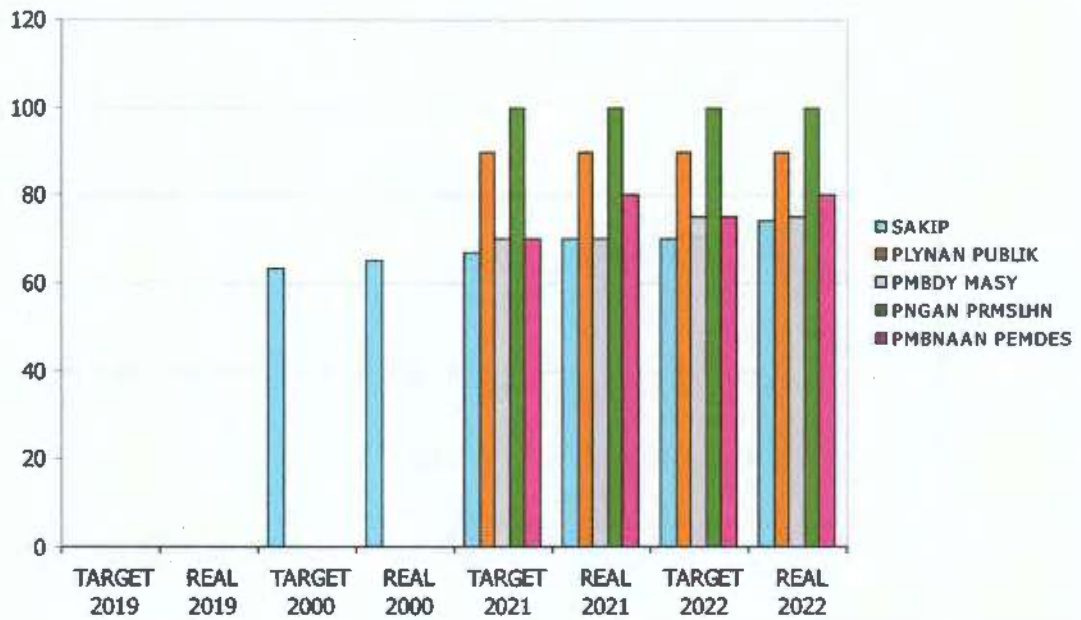
Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Kejayan dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Kejayan adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Kejayan adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kejayan berdasarkan Renstra 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN KEJAYAN



Secara umum Kecamatan Kejayan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2022. Capaian Kinerja pada masing-masing indikator program disampaikan sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian sasaran kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kantor Kecamatan Kejayan sebagai berikut :

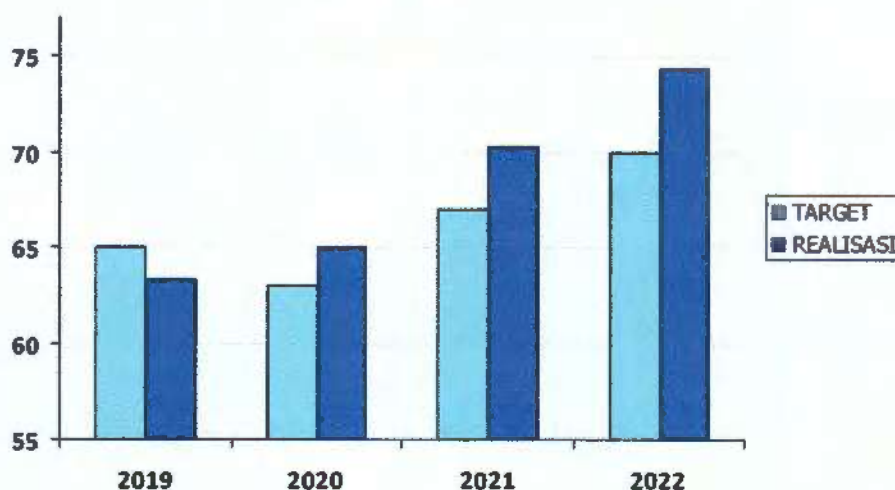
Tabel :

PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
INDIKATOR NILAI SAKIP

SASARAN KINERJA	TARGET					REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP	-	63	67	70		-	65	68,34	70,22

Sumber data : Laporan Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2019-2022

Gambar :
**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
 INDIKATOR NILAI SAKIP**



Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP terhadap target kinerja pada tahun 2022, mengalami kenaikan yang progresif, sekalipun tidak terlalu signifikan pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

b. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan**

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya dengan mengedepankan fungsi pembinaan yang mencakup tiga faktor yaitu pembinaan kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan penggunaan teknologi. Indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan adalah persentase jenis pelayanan yang berkualitas

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan pada Kantor Kecamatan Kejayan sebagai berikut :

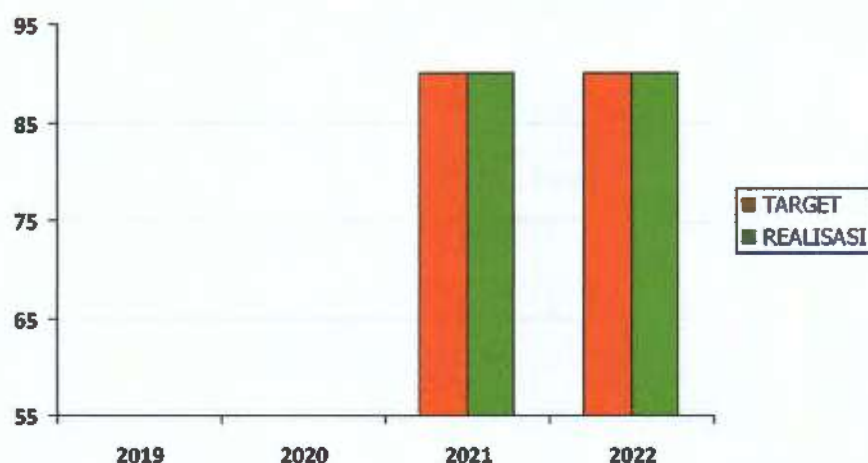
Tabel :
**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	90%	90%	-	-	90%	90%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN



Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

Jenis layanannya apa aja

Jelaskan data dasar pembentuk indicator tsb, capaian bbrp tahun yll, sesuai periode renstra (2019-2022)

c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Kejayan sebagai berikut :

Tabel :

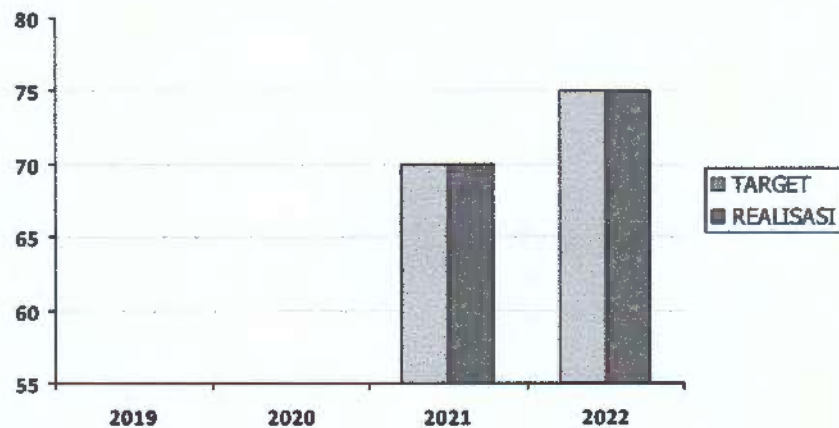
PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	70%	75%	-	-	70%	75%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

d. **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan**

Upaya mewujudkan kondusifitas wilayah dilakukan dengan mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan keamanan lingkungan, serta diarahkan untuk mampu menangani kejadian gangguan lingkungan dengan menegedepankan upaya preventif dan deteksi dini

Capaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Kejayan sebagai berikut :

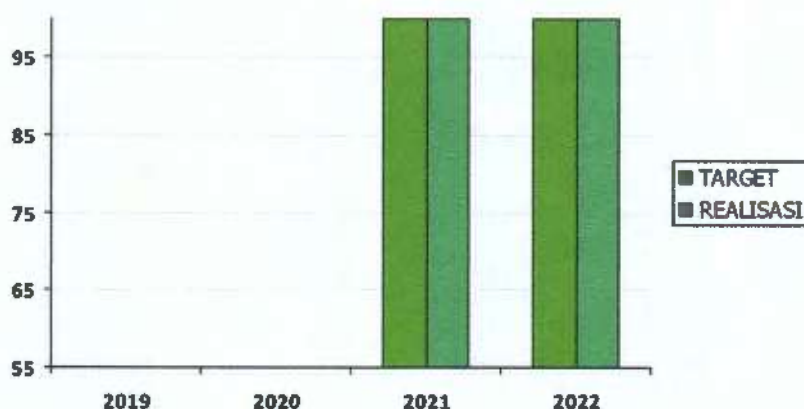
Tabel :

**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :
GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

e. Meningkatkan Pembinaan Desa/ Kelurahan

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan juga meningkatkan daya saing desa.

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan pada Kantor Kecamatan Kejayan sebagai berikut :

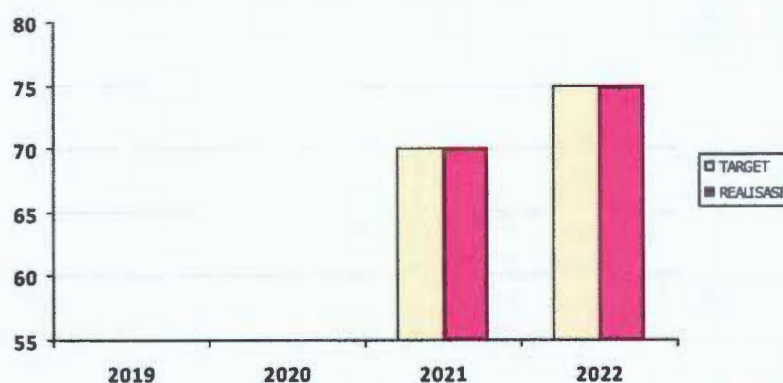
Tabel :
PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan	-	-	70%	75%	-	-	70%	75%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

TC.23 & TC.24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan misi dari Pembangunan 2024-2026 yaitu Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Kualitas Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Serta Terciptanya Nilai Tambah pada Sektor Ekonomi dan Daya Saing Industri.

Kecamatan sebagaia salah satu Kecamatan Kejayan yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Kecendrungan semakin tingginya tingkat kemiskinan (kemiskinan ekstrem) sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Rendahnya daya beli masyarakat yang berpotensi memicu timbulnya masalah kerawanan sosial
- 3) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat yang berpengaruh terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat khususnya stunting
- 5) Dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang tinggi;
- 3) Potensi wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;
- 4) Perkembangan teknologi informasi diberbagai aspek kehidupan.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kelompok sasaran layanan Kecamatan Kejayan yaitu :

- a) Pemerintahan Desa
- b) Masyarakat
- c) Kelompok Masyarakat

Mitra Pelayanan Perangkat Daerah Lembaga/mitra pelayanan di Kecamatan Kejayan yaitu :

- a) Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam)
- b) Puskesmas
- c) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- d) Balai Penyuluhan Pertanian

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Kecamatan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi kecamatan dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kecamatan Kejayan masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

Tabel :
KENDALA DAN HAMBATAN

KENDALA	HAMBATAN
1. Dampak Pandemi COVID-19	1. Perubahan kebijakan dan dinamika lingkungan strategis
2. Belum terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan	2. Konsep perencanaan yang parsial dan cenderung sektoral
3. Belum terwujudnya sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan desa, kecamatan dan pemerintah daerah	3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap dokumen perencanaan

Seiring dengan kondisi tersebut diatas, peluang dan tantangan Kecamatan Kejayan dalam merealisasi program dan kegiatan kedepan, antara lain :

Tabel :

PELUANG DAN TANTANGAN

PELUANG	TANTANGAN
1. Efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan	1. Penyederhanaan prosedur teknis pelaksanaan program dan kegiatan berbasis teknologi informasi
2. Integrasi perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran	2. Sinkronisasi dokumen perencanaan desa, kecamatan dan pemerintah daerah
3. Konsepsi perencanaan yang holistik dan sustainable	3. SDM aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perumusan program dan kegiatan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kejayan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

➤ Kekuatan :

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas
- b. Landasan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- c. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- d. Adanya sarana dan prasarana

➤ Kelemahan :

- a. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- b. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- c. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- d. Data kinerja belum digunakan sebagai indikator melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

2. Lingkungan Eksternal

➤ Peluang :

- a. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- b. Komitmen Bupati dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi masyarakat
- c. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- d. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

➤ Ancaman :

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- b. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- c. Kebijakan instansi yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- d. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli

Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Kejayan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Belum sepenuhnya terwujud pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur;
- b. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan sebagai dampak perubahan dinamika lingkungan strategis
- c. Keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan;
- d. Perubahan regulasi yang berakibat pergeseran orientasi kerja aparatur pemerintah;
- e. Penerapan sasaran dan indikator pencapaian target kinerja belum terformulasikan secara jelas
- f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- g. Sarana dan prasarana penunjang yang belum sepenuhnya tersedia;

2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu;
- b. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pejabat/ staf pelaksana
- c. Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima;
- d. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap pelayanan;
- e. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi;

3. Pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b. Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c. Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e. Masih rendahnya usulan masyarakat yang terkonsolidasi dalam Musrenbang Kabupaten.

4. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a. Masih tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip.

5. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;

- b. Belum terwujud kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang baik.
- c. Konsep perencanaan sektoral yang belum selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten dan kecamatan
- d. Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil desa;

Lebih lanjut mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel :

PEMETAAN PERMASALAHAN

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Tata Kelola Organisasi dan Manajemen ASN	Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur	Rendahnya kompetensi aparatur Keterbatasan sarana dan prasarana
	Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan	Seringnya terjadi perubahan rencana anggaran akibat perubahan regulasi dan ketentuan	Banyaknya sistem aplikasi yang belum terintegrasi dengan perencanaan prog/ kegiatan dan anggaran
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan	Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima Minimnya pemanfaatan teknologi informasi
3.	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Masyarakat	Minimnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan/ Pokmas di desa/ kelurahan Bantuan sosial belum tepat sasaran	Belum aktifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelompok Masyarakat SDM petugas/ operator
			Belum terwujud akurasi data penerima bantuan sosial
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip
5.	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Masih terdapat permasalahan hukum terhadap pengelolaan anggaran desa	Kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang baik Tingkat SDM aparatur desa

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Kejayan dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Kejayan.

Berdasar identifikasi permasalahan diatas, maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kejayan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur sehingga terwujud aparatur yang profesional, responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan strategis
2. Peningkatan pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketertiban lingkungan sekitar;
5. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta tertib administrasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Kejayan mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**" serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Kejayan yakni "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan**". Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan". Adapun sasaran renstra Kecamatan Kejayan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90,00	91,00	92,00
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,50	77,00	77,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Kejayan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa menjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Kejayan :

Tabel 5.1

Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<p><i>Strengths</i> (Kekuatan) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	<p><i>Weakness</i> (Kelemahan) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat2. Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur

DARI LUAR	<p><i>Opportunity</i> (Kesempatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik 2. Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya 3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan 	<p><i>Threats</i> (Ancaman) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika 2. Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan 3. Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Kejayan tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tujuan, Tabel 5.2 Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan	IKM Kecamatan				
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan"** sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kejayan mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(9)
	Tujuan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89,43	89,65	90	91	92	93
	Sasaran						
1	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,00	70,25	71,00	72,50	73,00	70,22

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Kejayan digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Kejayan disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

TELAH DITELITI		
PEJABAT	TANGGAL	PARAF
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala Bappelitbangda		
Camat Kejayan		
Sekretaris Camat		
Kabid. PPM Bappelitbangda		

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

**Tabel 2.3.1 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kejayan
Kabupaten Pasuruan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(21)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,36 Skor	82,70 Skor	83,00 Skor	83,20 Skor	83,5 Skor	82,36 Skor	82,70 Skor	87,14 Skor	92,3 Skor	-	100%	100%	105%	111%	-
1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas / Terfasilitasi	-	-	80%	85%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina	-	-	70%	75%	80%	-	-	100%	100%	-	-	-	143%	133%	-
3	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	70%	75%	80%	-	-	100%	100%	-	-	-	143%	133%	-
4	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	61,62 Nilai	62,25 Nilai	65,25 Nilai	70,05 Nilai	70,25 Nilai	76,12 Nilai	78,75 Nilai	68,34 Nilai	70,20 Nilai	-	123,53%	126,51%	104,74%	100,21%	-

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	5.590.000	-	-	-	-	5.590.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	-	-	173.870.907	118.109.340	315.500.000	-	-	228.820.907	172.860.066	-	-	-	-	-	-	132%	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	4.616.590	-	66.000.000	-	-	4.616.590	-	4.963.000	-	-	-	-	-	100%	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	9.997.372	12.848.655	50.000.000	-	-	9.997.372	42.767.016	6.148.920	-	-	-	-	-	100%	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	40.559.695	33.820.160	50.000.000	-	-	-	45.265.300	28.980.600	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	15.000.000	-	-	40.559.695	-	5.407.500	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	12.097.250	13.633.000	15.000.000	-	-	12.097.250	9.020.000	6.863.000	-	-	-	-	-	100%	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	49.000.000	-	35.000.000	-	-	103.950.000	-	-	-	-	-	-	-	212%	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	57.600.000	57.807.525	65.000.000	-	-	57.600.000	75.807.750	63.510.000	-	-	-	-	-	100%	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	16.791.509	271.468.659	-	-	-	19.978.380	44.914.770	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	121.468.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	18.955.000	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	16.791.509	50.000.000	-	-	-	19.978.380	15.521.270	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	10.438.500	-	-	-	-	-	-	-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	55.000.000	45.652.118	95.000.000	-	-	77.750.000	33.740.400	40.560.400	-	-	-	-	-	141%	-

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya tugas pelimpahan kewenangan Pemungutan PBB-P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	-	-	1.214.252.000	848.152.000	1.019.017.200	-	-	1.100.636.296	802.995.606	-	-	-	-	-	-	91%	-
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat - Jumlah pelaksanaan kegiatan managib	-	-	37.147.500	126.541.740	219.017.200	-	-	1.100.636.296	802.995.606	-	-	-	-	-	-	2963%	-
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wll Kerja Kec	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	37.147.500	-	149.017.200	-	-	9.900.000	-	-	-	-	-	-	-	27%	-
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	126.541.740	70.000.000	-	-	-	11.160.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masy	-	-	1.177.104.500	721.610.260	800.000.000	-	-	1.090.736.296	802.995.606	599.994.600	-	-	-	-	-	93%	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	802.849.756	487.150.092	550.000.000	-	-	802.849.796	491.022.356	408.126.600	-	-	-	-	-	100%	-
Pemberdayaan Masy di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	374.254.744	234.460.168	250.000.000	-	-	287.886.500	311.973.250	191.868.000	-	-	-	-	-	77%	-
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masy	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kel	-	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	-	-	11.780.000	5.000.000	55.000.000	-	-	114.290.480	-	-	-	-	-	-	-	970%	-
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	-	-	11.780.000	5.000.000	49.500.000	-	-	114.290.480	-	-	-	-	-	-	-	970%	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	11.780.000	5.000.000	8.000.000	-	-	-	4.886.250	7.975.000	-	-	-	-	-	-	-
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	41.500.000	-	-	114.290.480	-	84.908.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	-	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	6.303.000	-	-	-	-	-	-	-
PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	-	-	58.216.000	15.000.000	46.750.000	-	-	68.804.000	-	-	-	-	-	-	118%	-	-
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-	-	58.216.000	15.000.000	46.750.000	-	-	68.804.000	-	-	-	-	-	-	118%	-	-
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	10.987.000	-	10.137.500	-	-	10.137.500	-	-	7.075.000	-	-	-	92%	-	-
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	47.229.000	6.926.875	-	-	-	47.299.000	6.926.875	-	-	-	-	-	100%	-	-
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	-	-	-	-	9.039.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	8.073.125	8.073.125	-	-	11.367.500	6.712.375	7.075.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan pemantauan keamanan lingkungan pelaksanaan Ptlkades	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	4.278.000	-	-	-	-	-	-	-
PROG. PELAYANAN ADM PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor	615.252.019	653.017.755	-	-	-	655.492.019	811.042.749	720.108.361	-	-	107%	124%	-	-	-	253.653.955	437.328.626
- Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet	52.800.000	52.800.000	-	-	-	52.800.000	52.800.000	77.627.000	-	-	100%	100%	-	-	-	21.120.000	36.645.400
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	37.620.000	39.540.000	-	-	-	37.860.000	39.540.000	43.549.853	-	-	101%	100%	-	-	-	15.432.000	24.189.971
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	48.000.000	44.769.999	-	-	-	48.000.000	44.769.999	40.559.695	-	-	100%	100%	-	-	-	18.554.000	26.665.939
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	30.000.000	40.000.000	-	-	-	30.000.000	40.000.000	12.097.250	-	-	100%	100%	-	-	-	14.000.000	16.419.450
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan gedung/ kantor	6.000.000	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	4.616.590	-	-	100%	100%	-	-	-	2.400.000	3.323.318

- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000	25.865.000	-	-	-	12.000.000	39.775.000	9.997.372			100%	154%	-			7.573.000	12.354.47
--	--	------------	------------	---	---	---	------------	------------	-----------	--	--	------	------	---	--	--	-----------	-----------

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2.022	2.023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	102.000.000	61.165.730	-	-	-	102.000.000	140.975.730	103.950.000			100%	230%	-			32.633.146	69.385.14
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	40.000.000	15.695.006	-	-	-	80.000.000	80.000.000	57.626.600			200%	510%	-			11.139.001	43.525.32
- Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	286.830.000	347.380.000	-	-	-	286.830.000	347.380.000	353.580.000			100%	100%	-			126.842.000	197.558.00
- Pengadaan Pakaiannya Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas	-	19.800.000	-	-	-	-	19.800.000	16.501.980			-	100%	-			3.960.000	7.260.39
PROG. PENINGKATAN SARPRAS APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	-	-	-	-	-	73.257.500	20.000.000	-			0%	0%	-			-	18.651.50
- Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung	-	-	-	-	-	73.257.500	20.000.000	-			100%	100%	-			-	18.651.50
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	128.000.000	20.000.000	-	-	-	128.000.000	-	-			100%	0%	-			29.600.000	25.600.00
- Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair kantor	100.000.000	22.000.000	-	-	-	115.405.250	-	-			115%	0%	-			24.400.000	23.081.05
- Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000			-	-	-			-	-
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah ruang rumah dinas yang terpelihara	80.000.000	25.000.000	-	-	-	35.000.000	15.000.000	198.625.964			44%	60%	-			21.000.000	49.725.19
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung yang dapat diperbaiki	100.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	25.000.000	198.423.612			40%	100%	-			25.000.000	52.684.72
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diperbaiki	115.350.000	109.350.000	-	-	-	115.350.000	109.350.000	80.697.500			100%	100%	-			44.940.000	61.079.50
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang diperbaiki	-	-	-	-	-	-	-	5.445.000			-	-	100%			-	1.089.00
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	Jumlah taman yang diperbaiki	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-			-	-
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	30.000.000	15.000.000	-	-	-	30.000.000	15.000.000	22.421.630			-	-	-			9.000.000	13.484.32
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	Persentase penyel. kegiatan pemerintahan di kelurahan gratitunon	370.000.000	1.259.744.948	-	-	-	1.143.637.250	1.259.744.948	1.350.336.094			309%	100%	-			325.948.990	750.743.65
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Gratitunon	Terselenggaranya operasional kegiatan pemerintahan kel gratitunon	370.000.000	-	-	-	-	942.384.500	-	180.486.298			255%	-	-			74.000.000	224.574.16
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gratitunon	Terpenuhinya kebutuhan sarpras kelurahan gratitunon	-	1.175.668.948	-	-	-	201.252.750	1.175.668.948	803.849.796			100%	100%	100%			235.133.790	436.154.29
- Pemberdayaan Masy di Kelurahan Gratitunon	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masy	-	84.076.000	-	-	-	-	84.076.000	366.000.000			-	-	-			16.815.200	90.015.20
PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Kecamatan	-	75.310.000	-	-	-	-	64.650.000	70.454.000			-	86%	-			-	-
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-	6.500.000	-	-	-	-	6.500.000	2.688.000			-	100%	-			-	-
- Peningkatan Kesadaran Masy akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan	-	68.810.000	-	-	-	-	58.150.000	67.766.000			-	85%	-			-	-

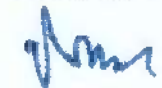
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	7.050.000	-	-	-	-	-	7.050.000	5.590.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.410.000	2.528.000
--	--	---	-----------	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	-----------	-----------

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN								
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2.022	2.023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI							
- Fasilitas dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu	-	-	-	-	-	-	7.050.000	5.590.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.528.000
- Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	Terwujudnya pelayanan prima	-	13.673.400	-	-	-	-	13.673.400	5.001.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.734.680	3.735.020
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KEL KECAMATAN	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina	-	35.282.635	-	-	-	-	35.282.635	30.894.760	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.056.527	13.235.475
	Prosentase usulan muarenbang yang berhasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kec	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	-	27.000.000	-	-	-	-	27.000.000	30.894.760	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000	11.578.952
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Peningkatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	-	8.282.635	-	-	-	-	8.282.635	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656.527	1.656.527
- Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya KJM tingkat desa	-	8.500.000	-	-	-	-	7.700.000	-	-	-	-	91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan	-	7.250.000	-	-	-	-	7.250.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	Terwujudnya Forum Silaturahmi Ulama-Umara	-	64.000.000	-	-	-	-	101.500.000	52.965.000	37.147.500	-	-	100%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan operasional kel gratturnon	-	252.227.650	-	-	-	-	252.227.650	180.486.298	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fasilitas Kegiatan MTQ	Terlaksananya partisipasi lomba MTQ tingkat Kab	-	16.100.000	-	-	-	-	17.750.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya pemberdayaan kelompok perempuan dan perlindungan anak	-	7.700.000	-	-	-	-	11.500.000	37.147.500	-	-	-	149%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa bagi Perangkat Desa	Terwujudnya peningkatan kapasitas perangkat desa di bidang pengelolaan keuangan	-	53.050.000	-	-	-	-	-	47.299.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Peningkatan Kualitas SDM Kesj Sosial Masyarakat	Peningkatan kapasitas TKSK	-	6.700.000	-	-	-	-	6.700.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sosialisasi Pemberton Bantuan Sosial kepada Masy/ Kel. Masy	Terlaksananya kegiatan sosialisasi bantuan	-	2.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sosialisasi Pengembangan UMKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan UMKM	-	8.650.000	-	-	-	-	8.650.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROG. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap	-	42.252.020	-	-	-	-	42.252.020	31.159.521	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan	Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	9.900.000	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman	-	8.925.000	-	-	-	-	8.925.000	9.900.000	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fasilitas Penegakan Perda/ Perkada	Terlaksananya fasilitas penegakan perda/perkada	-	10.400.000	-	-	-	-	10.400.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembinaan Satuan Linmas di Lingkungan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan Satlinmas	-	7.925.000	-	-	-	-	7.925.000	11.357.500	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kedisiplinan aparatur	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000
- Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakelan dinas	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja OPD yang tepat waktu	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan keuangan	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemberian layanan yang dapat	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000
- Optimalisasi Kinerja Lembaga Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan prima	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000
PROG. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemberian layanan bidang kependudukan yang dapat difasilitasi	9.600.000	-	-	-	-	9.600.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.920.000	1.920.000
- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang kependudukan	Terwujudnya pelayanan prima di bidang kependudukan	9.600.000	-	-	-	-	9.600.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.920.000	1.920.000
PROG. PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PNCGAHAN TINDAK KRIMINAL	Persentase pelaksanaan koordinasi pengendalian kondisi keamanan wilayah	13.500.000	-	-	-	-	13.500.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2.700.000	2.700.000
- Peningkatan kerja sama dg aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan	Terwujudnya peningkatan koordinasi FORKOMPIMKA	13.500.000	-	-	-	-	13.500.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2.700.000	2.700.000
PROG. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase terbentuknya kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan	23.390.000	-	-	-	-	25.390.000	-	-	-	-	-	109%	-	-	-	-	4.678.000	5.078.000
- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya pemberdayaan kelompok perempuan dan perlindungan anak	23.390.000	-	-	-	-	25.390.000	-	-	-	-	-	109%	-	-	-	-	4.678.000	5.078.000
PROG. PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase fasilitasi kegiatan kepemudaan	15.450.000	-	-	-	-	15.450.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	3.090.000	3.090.000
- Pembinaan organisasi kepemudaan	Terwujudnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	15.450.000	-	-	-	-	15.450.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	3.090.000	3.090.000
PROG. FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG	Persentase pemanfaatan jaringan informasi dan	10.250.000	-	-	-	-	10.250.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2.050.000	2.050.000
- Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	Terwujudnya KIM tingkat desa	10.250.000	-	-	-	-	10.250.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2.050.000	2.050.000
PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase fasilitasi kegiatan PHBN dan PHBI	87.443.400	-	-	-	-	91.793.400	-	-	-	-	-	105%	-	-	-	-	-	-
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya kegiatan PHBN dan PHBI	87.443.400	-	-	-	-	91.793.400	-	-	-	-	-	105%	-	-	-	-	-	-
PROG KOORD PNYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/	Persentase peningkatan koord dan pembinaan pemerintahan desa	111.620.000	-	-	-	-	-	-	21.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22.324.000	4.299.000

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2.022	2.023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
- Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kalola pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	21.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.299.000
- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah pelaporan keuangan desa tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terselenggaranya tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa sesuai dengan SOTK pemerintah desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	Terlaksananya kegiatan Pilkades Serentak	39.070.000	-	-	-	-	39.070.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	7.814.000	7.814.000
- Bimtek Pengelola Keuangan Desa bagi Perangkat Desa	Terwujudnya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	72.550.000	-	-	-	-	72.550.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	14.510.000	14.510.000
PROG. PEMBERDAYAAN MASY UNTUK MEN JAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Persentase penyelesaian gangguan keamanan tingkat desa	10.850.000	-	-	-	-	10.850.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2.170.000	2.170.000
- Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat	Terbentuknya Satlinmas Kel/ Desa	10.850.000	-	-	-	-	10.850.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2.170.000	2.170.000
PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase trakmodnya usulan prog/ keg dalam Muarenbang RKPD Kab	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terkonsolidasinya usulan prog/ keg dalam Muarenbang RKPD tingkat Kec	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000
PROG. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESJHTERAAN SOSIAL	Persentase pendampingan program bantuan sosial	15.800.000	-	-	-	-	15.800.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	3.160.000	3.160.000
- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya peningkatan kapasitas TKSK	10.700.000	-	-	-	-	10.700.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2.140.000	2.140.000
- Sosialisasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat/ Kel. Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi program bantuan pemerintah	5.100.000	-	-	-	-	5.100.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.020.000	1.020.000
		1.419.155.419	2.065.607.358	5.274.167.021	4.602.448.172	6.116.918.143	2.201.020.169	2.232.972.352	7.945.594.184	802.995.606	-						#REF!	#REF!

CAMAT KEJAYAN,



BASMI, S.Pd, MM

NIP. 19670204 199802 1 004

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kejayan
Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			80,00	85,00	90,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	-	-	-	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan Yang Telah Dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)	-	-	-	100%	100%
		Meningkatnya Ketentraman Dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik Yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	-	-	-	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	60,00	60,00	65,00	67,00	70,00

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			Meningkatkan Akses Dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Menfasilitasi Pelayanan Kepada Masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Membangun budaya Organisasi Berorientasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan		

Tabel T-C-27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kajayan
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung jawab	Lokal								
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				Transisi Tahun 2027							
									Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	DKM Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung jawab	Lokal								
									Persebaran kebutuhan urusan pemerintahan yang terapan	100%	3.773.450.997	100%	4.150.796.097	100%	4.565.875.706	100%			12.490.122.800	100%	5.009.153.277					
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%			36.300.000	100%	99.360.000	100%	26.820.000			
										1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen			11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	33.100.000	1 dokumen	13.310.000	Kec Kajayan
										2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen			11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	33.100.000	1 dokumen	13.310.000	Kec Kajayan
										3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 laporan	10.000.000	1 laporan			11.000.000	1 laporan	12.100.000	1 laporan	33.100.000	1 laporan	-	Kec Kajayan
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persebaran pemenuhan dok SAKIP	3.424.788.901	100%	3.229.157.637	100%	3.582.073.401			100%	3.907.280.741	100%	10.688.511.778	100%	4.298.008.818	Kec Kajayan	
										4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2.798.148.901	224 org-bln	2.602.517.637	224 org-bln			2.862.789.401	224 org-bln	3.149.046.341	224 org-bln	8.614.333.378	224 org-bln	3.463.950.978	Kec Kajayan
										5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Pegawai Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan untuk keperluan/kegiatan	585.060.000	204 org-bln	585.060.000	204 org-bln			643.966.000	204 org-bln	707.922.600	204 org-bln	1.935.548.600	204 org-bln	778.714.860	Kec Kajayan
										6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan	41.580.000	84 org-bln	41.580.000	84 org-bln			45.738.000	84 org-bln	50.311.800	84 org-bln	137.629.800	84 org-bln	55.342.980	Kec Kajayan
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persebaran pemenuhan adm BMD	-	100%	5.800.000	100%	5.500.000			100%	6.858.000	100%	16.850.000	100%	6.858.000	Kec Kajayan	
										7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.900.000			1 Laporan	6.050.000	1 Laporan	16.550.000	1 Laporan	6.655.000	Kec Kajayan	
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	20.800.000	100%	22.000.000			100%	24.200.000	100%	96.200.000	100%	26.420.800	Kec Kajayan	
										8	Pengadaan Paket Dinas Beserta Abstrak Perencanaan	Jumlah Paket Paket Dinas beserta abstrak Perencanaan	-	1 Paket	5.000.000	1 Paket			5.500.000	1 Paket	6.050.000	1 Paket	16.550.000	1 Paket	6.655.000	Kec Kajayan
										9	Pengadaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen			5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	16.550.000	1 Dokumen	6.655.000	Kec Kajayan
										10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang			11.000.000	3 Orang	12.100.000	2 Orang	33.100.000	2 Orang	13.310.000	Kec Kajayan
										11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Berenergi Sarung Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Berenergi Sarung Kantor	4.869.000	7 jenis	4.869.000	7 jenis			5.355.900	7 jenis	5.891.450	7 jenis	16.116.390	7 jenis	6.480.639	Kec Kajayan
										12	Penyediaan Peralatan dan Pendukung Kantor	Jumlah Peralatan dan Pendukung Kantor	3.529.000	22 jenis	3.529.000	22 jenis			3.881.500	22 jenis	4.270.090	22 jenis	11.680.990	22 jenis	4.697.099	Kec Kajayan
										13	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralasan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	1.000.000	1 Paket			1.100.000	1 Paket	1.210.000	1 Paket	3.310.000	1 Paket	1.331.000	Kec Kajayan
										14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	21.333.360	36 jenis	21.333.360	36 jenis			23.466.596	36 jenis	25.813.366	36 jenis	70.613.422	36 jenis	28.394.702	Kec Kajayan
										15	Penyediaan Barang Cetak dan Pencetakan	Jumlah pembelian barang cetakan dan pencetakan	7.494.400	8 jenis	7.494.400	8 jenis			8.243.840	8 jenis	9.068.224	8 jenis	24.806.464	8 jenis	9.575.046	Kec Kajayan
										16	Penyediaan Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3.600.000	1 Dokumen	3.600.000	1 Dokumen			3.960.000	1 Dokumen	4.320.000	1 Dokumen	11.916.000	1 Dokumen	4.791.600	Kec Kajayan
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan jasa	56.085.000	100 org	50.000.000	100 org	55.000.000	100 org		60.500.000	100 org	165.500.000	100 org	66.550.000	Kec Kajayan											
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan pertemuan dinas/instansi daerah	47.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	60.500.000	12 laporan	165.500.000	12 laporan	66.550.000	Kec Kajayan												
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terbekalannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	33.100.000	1 Dokumen	13.310.000	Kec Kajayan												
20	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	54.825.410	100%	122.907.000	100%	135.197.700	100%	148.717.470	100%	406.822.170	100%	163.989.217	Kec Kajayan												
21	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.740.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	1 Unit	26.620.000	Kec Kajayan												
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	1 Unit	26.620.000	Kec Kajayan												

					23	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Dideklakan	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	12.100.000	1 Unit	33.100.000	1 Unit	13.310.000	
					24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.095.410	4 unit	27.907.000	4 unit	30.697.700	4 unit	33.767.470	4 unit	92.372.170	4 unit	37.144.217	Kec Kejayan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penuhandaan	52.267.000	100%	52.267.000	100%	58.593.760	100%	64.483.070	100%	176.313.770	100%	76.898.377	Kec Kejayan
					25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	49.767.000	96 rek-bln	49.767.000	96 rek-bln	54.743.700	96 rek-bln	60.218.070	96 rek-bln	164.728.770	96 rek-bln	66.238.677	Kec Kejayan
					26	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000	7 unit	3.500.000	7 unit	3.850.000	7 unit	4.235.000	7 unit	11.585.000	7 unit	4.658.500	Kec Kejayan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.293.000	100%	141.293.000	100%	177.422.960	100%	195.166.256	100%	533.881.816	100%	214.681.782	Kec Kejayan
					27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	89.087.400	5 unit	89.087.400	5 unit	97.996.140	5 unit	107.795.754	5 unit	294.679.294	5 unit	118.575.329	Kec Kejayan
					28	Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	5 unit	10.000.000	5 unit	11.000.000	5 unit	12.100.000	5 unit	33.100.000	5 unit	13.310.000	
					29	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 unit	10.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	12.100.000	1 unit	33.100.000	1 unit	13.310.000	
					30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	45.166.400	1 Paket	45.166.400	1 Paket	49.663.040	1 Paket	54.651.344	1 Paket	149.500.784	1 Paket	60.116.478	Kec Kejayan
					31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatngedung/kantor	7.039.800	3 jenis	7.039.800	3 jenis	7.743.780	3 jenis	8.518.158	3 jenis	23.301.738	3 jenis	9.369.974	Kec Kejayan
						PROGRAM PERYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen non perijinan yang diarahkan ke tingkat kecamatan	174.293.500	100%	204.293.500	100%	224.722.850	100%	247.195.135	100%	676.211.485	100%	271.914.649	Kec Kejayan
						Hasil Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggara an Kecamatan												
						Koordinator Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	174.293.500	41 laporan	184.293.500	41 laporan	202.722.850	41 laporan	222.995.135	41 laporan	610.011.485	41 laporan	245.294.649	Kec Kejayan
					32	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	37.072.000	2 laporan	37.072.000	2 laporan	40.779.200	2 laporan	44.857.120	2 laporan	122.708.320	2 laporan	49.342.832	Kec Kejayan
					33	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Keturahan Kejayan)	137.221.500	12 laporan	147.221.500	39 laporan	161.943.650	12 laporan	178.136.015	12 laporan	467.303.165	12 laporan	195.951.817	Kec Kejayan
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilikwidasi oleh Unit Kerja PD dan/atau di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	-	12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	12 laporan	33.100.000	12 laporan	13.310.000	
					34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	3 jenis	10.000.000	3 jenis	11.000.000	3 jenis	12.100.000	3 jenis	33.100.000	3 jenis	13.310.000	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Instansi Pusat	Persentase Realisasi PBB-P2	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	100%	13.310.000	
					35	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	11.000.000	12 Laporan	12.100.000	12 Laporan	33.100.000	12 Laporan	13.310.000	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEMERDEKAAN	1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	643.285.000	35%	667.050.000	35%	733.755.000	35%	807.130.500	35%	2.207.835.500	35%	75.833.556	Kec Kejayan
						2. Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	43.410.000	1 laporan	57.050.000	1 laporan	62.755.000	1 laporan	69.836.500	1 laporan	188.835.500	1 laporan	75.933.550	Kec Kejayan
					36	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.880.000	5 Lembaga	18.500.000	5 Lembaga	20.250.000	5 Lembaga	22.385.000	5 Lembaga	61.235.000	5 Lembaga	24.623.500	Kec Kejayan
					37	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	28.550.000	6 laporan	36.550.000	6 laporan	42.405.000	6 laporan	46.645.500	6 laporan	127.600.500	6 laporan	51.310.050	Kec Kejayan
						Persentase Kelurahan yang terbias dengan baik	619.875.000	100%	618.000.000	100%	671.000.000	100%	738.100.000	100%	2.019.100.000	100%	811.910.000	Kec Kejayan	

					38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kelman)	Jumlah sorpas kelurahan yang dibangun	398.750.000	4 kegiatan	420.000.000	4 kegiatan	462.000.000	4 kegiatan	508.200.000	4 kegiatan	1.390.200.000	4 kegiatan	559.020.000	
					39	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kajayan)	Jumlah pokmas dan ormas yg melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	221.125.000	10 Pokmas/Ormas	190.000.000	10 Pokmas/Ormas	209.000.000	10 Pokmas/Ormas	229.900.000	10 Pokmas/Ormas	628.900.000	10 Pokmas/Ormas	252.890.000	
						PROGRAM KOORDINASI KETERTAMPAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	13.500.000	83%	23.500.000	83%	25.850.000	83%	28.438.000	83%	77.785.808	83%	31.278.598	Kec Kajayan
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kebersamaan dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Lembar Koordinasi/Inisiasi yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	13.500.000	78%	13.500.000	78%	14.850.000	78%	16.335.000	78%	44.685.000	78%	17.068.900	Kec Kajayan
					40	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum	4.500.000	4 laporan	4.500.000	4 laporan	4.950.000	4 laporan	5.445.000	4 laporan	14.895.000	4 laporan	5.989.500	Kec Kajayan
					41	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum	9.000.000	8 laporan	9.000.000	8 laporan	9.900.000	8 laporan	10.890.000	8 laporan	29.790.000	8 laporan	11.979.000	
						Koord. Penanaman dan Penegetan Perda dan Perkada	Persentase laporan ketertiban dan ketertaman sosial	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	100%	13.310.000	
					42	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penagakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	-	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	12.100.000	2 Laporan	33.100.000	2 Laporan	13.310.000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase bentuk esai yang tertanggap sesuai dengan	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	100%	13.310.000	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Penangan	-	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	11.000.000	3 Laporan	12.100.000	3 Laporan	33.100.000	3 Laporan	13.310.000	
					43	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik	10.000.000	50 org	10.000.000	50 org	11.000.000	50 org	12.100.000	50 org	33.100.000	50 org	13.310.000	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	100%	30.131.914	100%	33.145.105	100%	36.489.615	100%	98.736.634	100%	40.105.577	
							2. Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Berdasarkan APBD	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	100%	40.105.577	
						Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	-	12 laporan	30.131.914	12 laporan	33.145.105	12 laporan	36.489.615	12 laporan	98.736.634	12 laporan	40.105.577	
					44	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	11.000.000	12 dokumen	12.100.000	12 dokumen	33.100.000	12 dokumen	13.310.000	
					45	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Rendahnya Ases Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	12 laporan	33.100.000	12 laporan	13.310.000	
					46	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	10.131.914	5 Desa/Kelurahan	10.131.914	19 Desa	11.145.105	19 Desa	12.259.615	19 Desa	33.536.634	19 Desa	13.485.577	
						TOTAL		4.669.174.171		4.706.426.411		5.179.289.052		5.697.195.957		35.584.891.419		5.441.695.582	

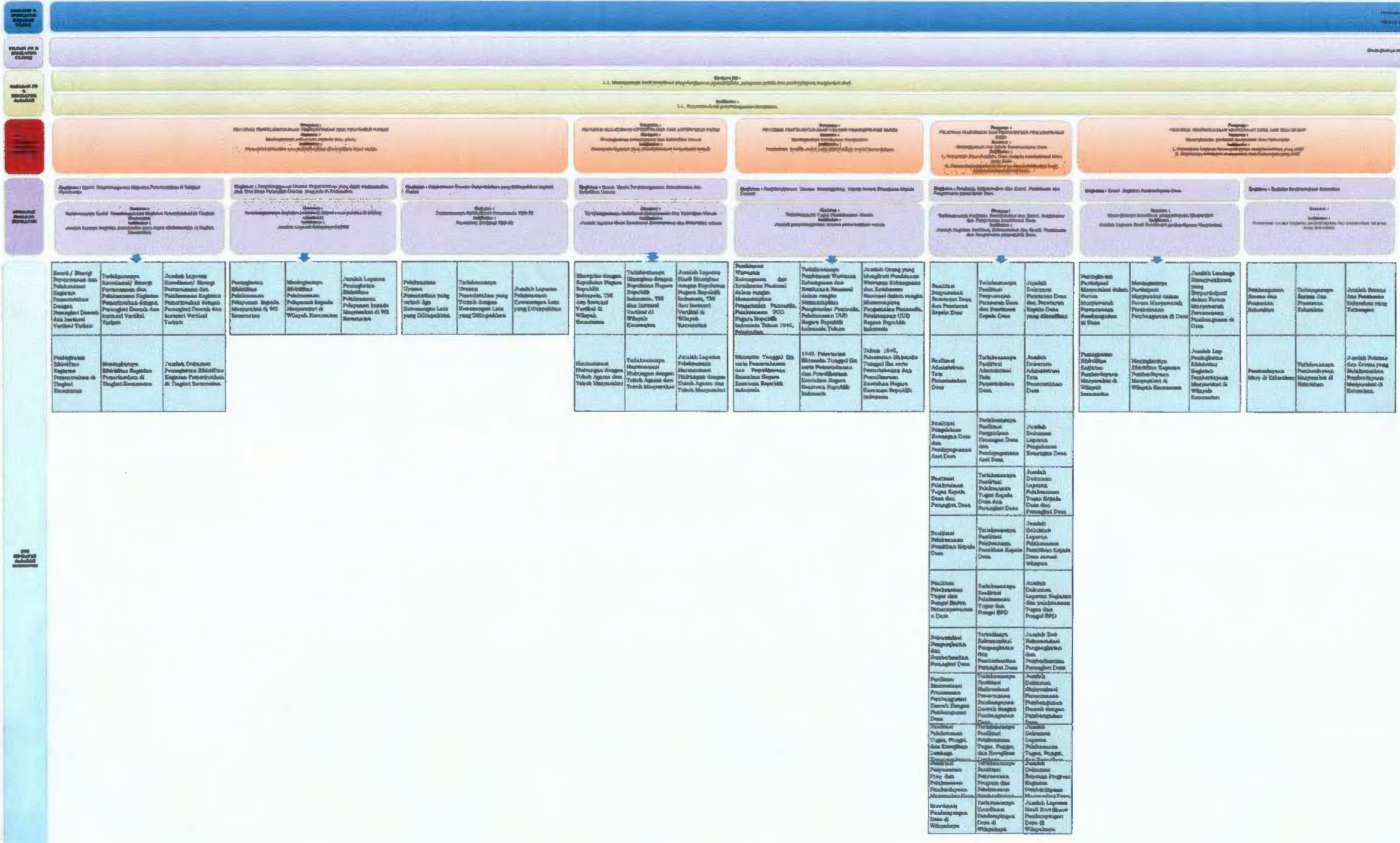
CAMAT KEJAYAN
KABUPATEN PASURUAN



BASMI, S.Pd, MM
NIP. 19870204 199802 1 004

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Indikator Tujuan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		80,00	85,00	88,00	88,00
1	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah		71,00	72,00	73,00	74,00
2	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan		100%	100%	100%	100%



REVISI

1.1. **Indikator**
 1.1.1. **RA PD**

Indikator
 1.1.1.1. **RA PD**

Indikator
 1.1.1.1.1. **RA PD**

Indikator
 1.1.1.1.1.1. **RA PD**

Indikator
 1.1.1.1.1.1.1. **RA PD**

<p>Indikator 1.1.1.1.1.1.1.1. RA PD</p>	<p>Indikator 1.1.1.1.1.1.1.2. RA PD</p>	<p>Indikator 1.1.1.1.1.1.1.3. RA PD</p>	<p>Indikator 1.1.1.1.1.1.1.4. RA PD</p>	<p>Indikator 1.1.1.1.1.1.1.5. RA PD</p>	<p>Indikator 1.1.1.1.1.1.1.6. RA PD</p>	<p>Indikator 1.1.1.1.1.1.1.7. RA PD</p>	<p>Indikator 1.1.1.1.1.1.1.8. RA PD</p>
<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.1.1. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.1.2. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.1.3. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.1.4. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.1.5. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.1.6. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.1.7. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.1.8. RA PD</p>
<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.2.1. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.2.2. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.2.3. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.2.4. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.2.5. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.2.6. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.2.7. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.2.8. RA PD</p>
<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.3.1. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.3.2. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.3.3. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.3.4. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.3.5. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.3.6. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.3.7. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.3.8. RA PD</p>
<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.4.1. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.4.2. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.4.3. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.4.4. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.4.5. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.4.6. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.4.7. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.4.8. RA PD</p>
<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.5.1. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.5.2. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.5.3. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.5.4. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.5.5. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.5.6. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.5.7. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.5.8. RA PD</p>
<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.6.1. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.6.2. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.6.3. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.6.4. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.6.5. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.6.6. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.6.7. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.6.8. RA PD</p>
<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.7.1. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.7.2. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.7.3. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.7.4. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.7.5. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.7.6. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.7.7. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.7.8. RA PD</p>
<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.8.1. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.8.2. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.8.3. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.8.4. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.8.5. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.8.6. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.8.7. RA PD</p>	<p>Programas 1.1.1.1.1.1.1.8.8. RA PD</p>

**Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

No.	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1	Pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	Dengan meningkatkan SDM operator data	Pelayanan berbasis teknologi informasi
2	Tingginya angka kriminalitas	Dengan meningkatkan SDM pada masyarakat sekitar sehingga dapat menurunkan angka kriminalitas yang ada	
3	Berkurangnya lapangan pekerjaan	Dengan meningkatkan UMKM yang ada sehingga dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan baru	

Keterangan:

- 1 Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
- 2 Isu aktual adalah kondisi yang terjadi di luar Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan kinerja Perangkat Daerah (Misal: Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat).
- 3 Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Pasuruan, Desember 2022
**CAMAT KEJAYAN
KABUPATEN PASURUAN**

BASMI, S.Pd, MM
NIP. 19670204 199802 1 004

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Review Renstra Kecamatan Kejayan 2024 - 2026 dimaksudkan untuk merevisi target dan capaian kinerja pada Tahun berjalan sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan dan sebagai pedoman OPD Kecamatan Kejayan dalam melaksanakan Program kegiatan agar sesuai dengan Renstra Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Kejayan digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Semoga dengan disusunnya review Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kejayan ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Kejayan. Demikian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Kejayan disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF